

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI DESA  
PARSAORAN KECAMATAN SITIO-TIO KABUPATEN  
SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ROTAYU SITINJAK**

**188520063**



**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/22

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI DESA  
PARSAORAN KECAMATAN SITIO-TIO KABUPATEN  
SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area**



**OLEH :  
ROTAYU SITINJAK**

**188520063**

**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)22/9/22

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan  
Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa  
Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samsir  
Provinsi Sumatera Utara.

Nama Mahasiswa : Rotayu Sitinjak

NIM : 188520063

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui oleh:  
Komisi Pembimbing

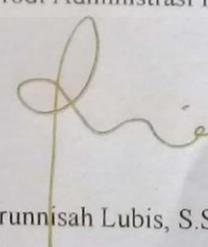
Pembimbing I Pembimbing II

Yurial Arief Lubis S.Sos,M.IP Nina Angelia. S.Sos,M.Si

Mengetahui:

Dekan Ka. Prodi Administrasi Publik

  
Dr. Effiat Juliana Hasibuan, M.Si

  
Khairunnisah Lubis, S.Sos,M.I.Pol

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa lembar skripsi yang saya tulis merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana yang mana merupakan hasil dari proses hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dari skripsi ini saya mengutip karya orang lain yang sumbernya telah ditulis dengan jelas sesuai dengan standar, kaidah dan etika penulisan akademik. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar sarjana saya dan sanksi yang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika dikemudian hari di temukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Agustus 2022



Rotayu Sitinjak

188520063



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROTAYU SITINJAK  
NPM : 188520063  
Program Studi : Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 22 Agustus 2022

Yang Menyatakan

(ROTAYU SITINJAK)

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI DESA PARSAORAN KECAMATAN SITIO-TIO KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program pemerintah dalam bantuan bersyarat yang bertujuan dalam mensejahterakan masyarakat yang tergolong miskin sebagai jaminan sosial untuk memperoleh kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial. Untuk itu yang menjadi sasaran dari PKH adalah Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Keluarga penerima manfaat merupakan masyarakat tergolong kurang mampu yang wajib mengikuti kewajiban yang telah ditetapkan didalam pedoman umum program keluarga harapan dalam meningkatkan sumberdaya manusia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Tehnik pegumpulan data/informasi melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi. Berdasarkan hasil kajian dan observasi bahwasanya pelaksanaan PKH di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir belum diimplementasikan dengan baik. Pendataan untuk peserta penerima bantuan PKH belum optimal dilaksanakan, masih banyak yang belum mendapatkan bantuan PKH. Pendampingan belum dilakukan dengan baik, Pencairan dana bantuan PKH dari kementerian sosial belum terlaksana secara efektif dan akurat dimana dana bantuan program keluarga harapan di Desa Parsaoran masih sering mengalami kemacetan.

**Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan**

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM POLICY IN REDUCING PROVERTY IN PARSAORAN VILLAGE SITIO-TIO DISTRICT SAMOSIR REGENCY NORTH SUMATERA PROVINCE.**

*The Family Hope Program (PKH) is one of the government programs in conditional assistance aimed at the welfare of the poor as social security to obtain health and education as well as social welfare. For this reason, the target of PKH is the Beneficiary Group (KPM). Beneficiary families are classified as underprivileged people who are obliged to follow the obligations set out in the general guidelines for the family of hope program in improving human resources. The purpose of this research is to find out how to implement the Policy for the Family Hope Program (PKH), to find supporting factors and inhibiting factors in the implementation of PKH in Parsaoran Village, Sitio-Tio District, Samosir Regency, North Sumatra Province. The method used by the researcher is descriptive qualitative. Techniques of collecting data/information through field observations, interviews, documentation. Based on the results of studies and observations that the implementation of PKH in Parsaoran Village, Sitio-Tio District, Samosir Regency has not been implemented properly. Data collection for participants receiving PKH assistance has not been optimally implemented, there are still many who have not received PKH assistance. Mentoring has not been carried out properly, the disbursement of PKH aid funds from the ministry of social affairs has not been carried out effectively and accurately where the assistance funds for the family of hope program in Parsaoran Village are still often jammed.*

**Keywords: Implementation, Family Hope Program (PKH), Poverty**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan kasih karunia yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik dimana dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara”**.

Selama proses penulisan skripsi ini, saya menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, akan sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ini, untuk itu saya ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
3. Bapak Yurial Arief Lubis S.Sos,M.IP sebagai pembimbing I yang telah memberikan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis selama penyusunan karya tulis ini.
4. Ibu Nina Angelia S.Sos,M.Si sebagai pembimbing II yang telah memberikan waktunya untuk membantu dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Zoraya alfathin rangkuti S.Sos.M.Si selaku sekretaris dalam penyusunan skripsi penulis

6. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
7. Terimakasih terkhusus orangtua saya untuk doa dan dukungannya, terimakasih kepada adek saya Artojoyo Sitinjak yang membantu saya secara materi selama perkuliahan, dan juga abang Domo Sitinjak, Lambok Sitinjak, dan juga kakak saya Dien Sitinjak, Rohanti Sitinjak, Heryani Sitinjak, Betty Sitinjak yang selalu mendorong dan memberikan motivasi untuk saya.
8. Terimakasih penulis ucapkan untuk Dinas sosial Kabupaten Samosir terkhusus kepada Bapak James Nainggolan S.Pd dan Bapak Damenra Naibaho A.Md yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data dan informasi tentang PKH serta meluangkan waktu untuk penulis, Kepala Desa Parsaoran yang membantu saya dan menerima saya penelitian di Desa Parsaoran, terimakasih kepada teman saya Sudirman Siahaan, yang membantu saya selama penelitian dan juga masyarakat Desa Parsaoran yang senang hati menerima saya serta meluangkan waktu untuk saya selama penelitian.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan membalas semua kebaikan pihak yang membantu. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Maret 2022

Penulis

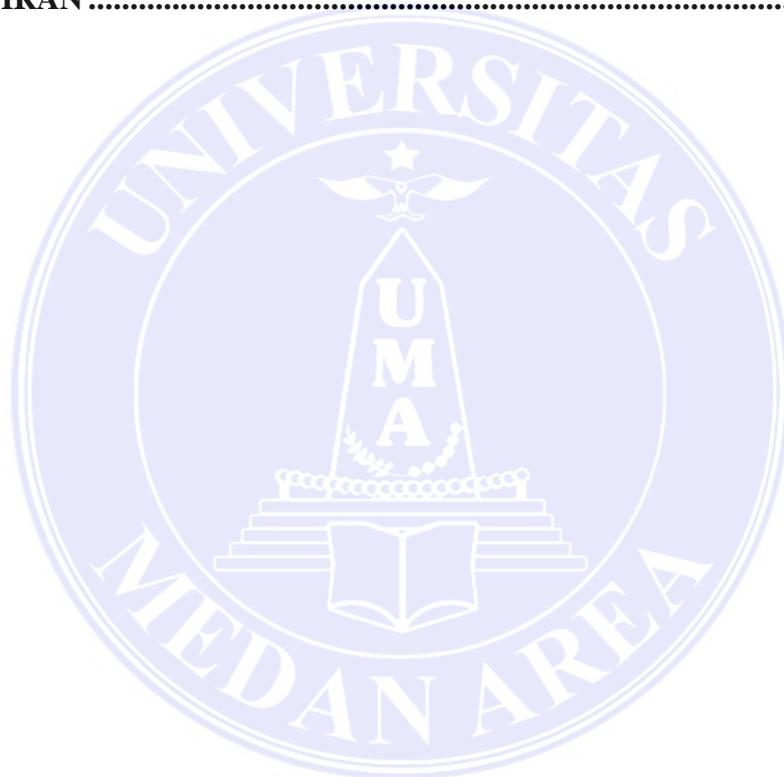
Rotayu sitinjak 188520063

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Masalah.....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Teori Kebijakan Publik.....	6
2.1.1 Karakteristik Kebijakan .....	9
2.1.2 Proses Kebijakan Publik .....	10
2.1.3 Unsur-Unsur Kebijakan .....	11
2.2 Teori Implementasi Kebijakan.....	12
2.2.1 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan .....	15
2.2.2 Model Implementasi Kebijakan .....	16
2.3 Teori Kemiskinan.....	17
2.3.1 Ukuran Kemiskinan .....	19
2.3.2 Faktor Kemiskinan .....	20
2.4 Program Keluarga Harapan .....	21
2.4.1 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH).....	22
2.4.2 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan .....	24
2.5 Penelitian Terdahulu .....	25

2.6 Kerangka Berpikir .....	26
2.6.1 Penjelasan Kerangka Berpikir .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
3.2.1 Lokasi Penelitian .....	31
3.2.2 Waktu Penelitian .....	32
3.3 Informan Penelitian .....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.5 Teknik Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL &amp; PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1 Sejarah Desa Parsaoran.....	39
4.1.2 Pemerintahan.....	41
4.1.3 Kependudukan.....	43
4.2 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) .....	45
4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Parsaoran.....	73
4.3.1 Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Parsaoran.....	73
4.3.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Parsaoran.....	77
a. Ekonomi.....	77
b. Ketidakmampuan SDM di Bidang Teknis dan Administrasi.....	78
c. Kurangnya Dana Bantuan Teknis.....	81

d. Kurangnya Partisipasi.....	84
e. Sistem Informasi Yang Kurang Mendukung .....	88
f. Perbedaan Tujuan .....	89
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>91</b>
5.1 Kesimpulan .....	91
5.2 Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komponen Program Keluarga Harapan .....	25
Tabel 2 Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 3 Waktu Penelitian .....	35
Tabel 4 Informan Penelitian .....	37
Tabel 5 Jumlah Penduduk Desa Parsaoran Berdasarkan Jenis Pekerjaan ...	46
Tabel 6 Jumlah Penduduk Desa Parsaoran Berdasarkan Pendidikan .....	47
Tabel 7 Jumlah Penerima PKH Berdasarkan Dusun .....	47
Tabel 8 Besaran Bantuan PKH .....	70
Tabel 9 Dampak Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Sebelum dan Sesudah Menerima PKH .....	70
Tabel 10 Bantuan Lain Yang Diterima Masyarakat Kurang Mampu di Desa Parsaoran .....	80

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berpikir .....	30
Bagan 2 Struktur Organisasi Desa Parsaoran.....	45



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menciptakan masyarakat yang adil dan sentosa merupakan salah satunya makna dari kemerdekaan. Untuk itu pemerintah memberikan sebuah kebijakan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan terbebasnya dari belenggu kemiskinan. Kemiskinan dapat dilihat berbagai faktor yaitu pada dasarnya masyarakat miskin sulit untuk memperoleh Pendidikan dan Kesehatan. Salah satu faktor dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Besarnya dana dalam pendidikan mengakibatkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka hanya dapat bersaing dilingkungannya dan akan sulit keluar dari zona tersebut, karena kurangnya wawasan dan keterampilan serta pengetahuan yang memadai untuk bersaing dilingkungan yang level lebih tinggi.

Selain itu masih banyak masyarakat yang menggunakan prinsip banyak anak banyak rejeki dikalangan masyarakat kurang mampu sehingga semakin banyak anak semakin banyak kebutuhan yang ditanggung dalam satu keluarga. Begitu juga dengan kesehatan, biaya pengobatan cukup tinggi, memilih memakai obat tradisional maupun pengobatan alternatif lainnya. Indonesia adalah Negara yang memiliki jumlah penduduk miskin yang cukup besar, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebanyak 25,144 juta jiwa atau 9,14 persen dari total penduduk Indonesia (BPS; 2019).

Berdasarkan data yang dirilis BPS Sumatera Utara persentasi penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 2019 masih realatif cukup besar yaitu sebesar 8,8% dan berada pada peringkat 17 dari 34 Provinsi di Indonesia. Perkembangan penduduk miskin di Sumatera Utara selama periode Maret 2018-Maret 2019 mengalami penurunan secara

konsisten. Jumlah penduduk miskin berkurang berkisar 42,94 ribu orang atau secara persentase berkurang sebesar 0,39 poin, yaitu dari 1.324,98 ribu orang (9,22%) pada Maret 2018 menjadi 1.282,04 ribu orang (8,83%) pada Maret 2019 (Nainggolan,2020,p.90).

Hasil survey sosial Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Maret 2020 menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Samosir sebanyak 15,80 ribu jiwa atau sebesar 12,48% dari jumlah penduduk Kabupaten Samosir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebanyak 15,79 ribu jiwa. Secara persentase penduduk miskin tahun 2020 di Kabupaten Samosir mengalami penurunan sebesar 0,04 Poin dari 12,52% pada Maret 2019 (BRS,2020). Dari hasil data Badan Pusat Statistika (BPS) yang diperoleh tahun 2020 jumlah penduduk di Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir sebanyak 8172 jiwa. Dari data BPS tahun 2021 Jumlah Penduduk di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir sebanyak 976 jiwa, berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan, bahwa jumlah penduduk miskin di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio sebanyak 190 KK.

Dalam mengatasi hal ini pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia serta memupuk kesejahteraan masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan serta kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat miskin.

Penyebab lainnya kemiskinan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera banyaknya pengangguran dan tingkat pendidikan yang rendah, jumlah beban hidup keluarga dan keterbatasan modal. Banyaknya masyarakat miskin di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara di dasari pada masih rendahnya sumberdaya manusia yang berkualitas, sehingga

rendahnya daya saing dalam merebut dunia pekerjaan yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Banyaknya anak muda ketergantungan sama orangtua, karena kualitas pendidikan yang rendah dan tidak memiliki ijazah Sma/Smk untuk melamar dunia pekerjaan, bahkan banyak putus sekolah seperti hanya tamatan SD dan SMP bahkan tidak sekolah sama sekali.

Hal ini untuk meminimalisir jumlah penduduk miskin diperlukan kebijakan dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu adanya kebijakan atau strategi yang harus diatasi oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk dalam pelaksanaan perbaikan sosial disemua lapisan masyarakat terutama untuk kalangan masyarakat kurang mampu. Dalam menyikapi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi masalah kemiskinan, tentu memiliki berbagai aspek masalah atau hambatan dari keberhasilan kebijakan tersebut, salah satunya sering kali tidak sesuai dengan keadaan tau kondisi dari suatu daerah, sehingga mengarah pada implementasi yang rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak jujur.

Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Samosir menanggapi masalah kemiskinan dengan mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu meningkatkan sistem perlindungan sosial yang mampu mengentaskan dan membantu masyarakat kurang mampu untuk mengakses pelayanan dalam kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Program keluarga harapan (PKH) ini dilatar belakangi dari adanya problem yang paling utama dalam masyarakat miskin merupakan rendahnya kualitas SDM dan kondisi masyarakat di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera masih banyak keluarga kurangnya perhatian terhadap pendidikan dan kesehatan ibu hamil dan kualitas gizi pada bayi dan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Akan tetapi dari pengamatan yang dilakukan peneliti adanya kejanggalan dalam pelaksanaan program keluarga harapan ini, dimana salah satu penerima bantuan PKH merupakan masyarakat yang tergolong

mampu. Dan adanya masyarakat yang layak menerima bantuan PKH ini tetapi tidak dapat menerima bantuan program keluarga harapan ini. Banyak masyarakat yang berkeluh kesah dalam hal bantuan ini ada beberapa masyarakat mengalami kemacetan dana bantuan dari program keluarga harapan ini sehingga merasa dirugikan dan kurangnya kepuasan dalam pelayanan petugas pendamping PKH.

Tentunya dalam pelaksanaan program PKH, masalah tidak semua atas kelalaian petugas, pasti memiliki hambatan yang dihadapi oleh petugas baik itu dari segi penyaluran dana bantuan maupun kendala lainnya, yang memiliki pengaruh didalam implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di lokasi tersebut.

Dari persoalan tersebut, penulis ingin mendeskripsikan, mengamati dan menganalisis bagaimana penerapan dalam pelaksanaan kebijakan program keluarga harapan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samsir Provinsi Sumatera Utara, apakah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari kebijakan terkhusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan, dan jika belum mencapai tujuan dari kebijakan tersebut apa yang menjadi faktor penghambat dari kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samsir Provinsi Sumatera Utara.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samsir Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samsir Provinsi Sumatera Utara?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasian Kebijakan Dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Semoga penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis, yang diharapkan dapat menambah serta mengembangkan pengetahuan dibidang ilmu apapun yang berkaitan dengan program keluarga harapan. Dari segi akademik semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan referensi yang saling berkaitan dengan implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara khususnya untuk yang ingin melanjutkan penelitian di tempat tersebut. Dan manfaat praktis dari penelitian ini semoga dapat menginformasikan terhadap pihak yang bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat terkait mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Kebijakan Publik**

Negara merupakan lembaga publik yang memiliki tujuan yang ingin dicapai serta memiliki beberapa masalah yang harus ditangani, diminimalisir, dan dicegah. Seperti dikemukakan oleh William Dunn dalam (Tachjan, 2006, p.14) permasalahan/isu yang harus dipecahkan oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan, atau peluang yang tidak disadari yang dapat dikenali tetapi hanya dapat dicapai melalui tindakan publik. Fungsi sentral pemerintah adalah merancang, menetapkan, serta melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat di kawasannya. Dalam hal ini memperlihatkan bahwa sebuah kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat dan tindakan itu merupakan pilihan dari pemerintah, dalam pelaksanaannya bahwa tindakan tersebut harus didasarkan pada moral dan kejujuran mulai dari atasan hingga anggotanya dalam menjalankan tindakan tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Carl Friedrich dalam (Anggra, 2014, p.16) serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu/kelompok maupun pemerintahan terhadap suatu lingkungan tertentu yang dapat memberikan hambatan maupun peluang dimana kebijakan yang diusulkan dapat digunakan untuk mengatasi upaya dalam mencapai keinginan yang diharapkan serta sasaran yang tepat. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Edwards dan Sharkansky dalam (Tachjan, 2006, p.13) Kebijakan publik dapat ditetapkan secara nyata dalam bentuk peraturan perundang-undangan, pidato-pidato pejabat tinggi

pemerintah ataupun dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut William Dunn dalam (Tachjan, 2006, p.19) Sistem kebijakan dan pola kelembagaan yang melalui politik dibuat memiliki tiga unsur yang bersifat timbal balik yang terdiri dari kebijakan publik, pelaku kebijakan serta lingkungan kebijakan. William Dunn menyatakan bahwa pelaku kebijakan (*stakeholder*) terdiri dari pembuat kebijakan, pelaksana serta kelompok sasaran. Dimana pembuat kebijakan itu merupakan orang atau sekelompok orang /organisasi yang mempunyai peran tersendiri dalam suatu kebijakan sebab mereka mampu untuk mempengaruhi baik didalam persiapan maupun pelaksanaan serta memantau kemajuan pelaksanaannya. Yang perlu diketahui bahwa kelompok sasaran adalah orang-orang atau sekelompok orang dalam masyarakat dimana keadaan ingin dipengaruhi oleh pengemban yang relevan. Para aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan publik (level dan isi) serta lingkungan kebijakan akan mempengaruhi efektivitasnya. Efektivitas kebijakan dapat dijelaskan dari segi proses, yang menyiratkan bahwa proses kebijakan itu sendiri menentukan atau mempengaruhi keberhasilan kebijakan.

Pada umumnya kebijakan publik dibuat dengan maksud untuk menetapkan tujuan hidup bersama dari sudut pandang instrumental, kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita publik. Yang pertama adalah cita-cita masyarakat seperti keadilan, kesetaraan dan transparansi. Kedua mengatasi masalah-masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan pelayanan publik yang tidak memadai. Ketiga menangkap peluang baru untuk kehidupan

masyarakat yang lebih baik seperti mendorong investasi, inovasi di bidang jasa dan meningkatkan ekspor. Terakhir melalui undang-undang perlindungan konsumen, izin gangguan, masyarakat dilindungi dari tindakan lain yang merugikan masyarakat (Handoyo, 2012, p. 19). Dalam kebijakan publik tentunya memiliki tahap-tahap yang ingin dikerjakan atau yang sering disebut dengan kerangka kebijakan publik. Dalam (Soebarsono, 2005 pp6-8) menuliskan bahwa suatu kebijakan publik memiliki kerangka kerja yang dinamakan dengan kerangka kerja kebijakan publik. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi kerangka kebijakan antara lain:

- a. Tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang dapat dicapai ini terdiri dari kesulitan tujuan yang harus dipenuhi. Semakin sulit dalam pencapaian kinerja kebijakan maka semakin rumit tujuan kebijakan. Begitu juga dengan sebaliknya Semakin sederhana tujuan kebijakan semakin gampang dalam mencapai.
- b. Preferensi nilai yang ingin diperhitungkan untuk pembuatan suatu kebijakan. Kebijakan yang telah menggabungkan banyak nilai, maka akan jauh lebih sulit untuk diterapkan dari pada kebijakan berfokus pada satu nilai.
- c. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Memiliki sumberdaya yang berkualitas akan berpengaruh pada Kinerja suatu kebijakan dan juga ditentukan oleh sumberdaya finansial, material dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas orang-orang yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan

ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

- e. Lingkungan sekitarnya. Yang mana lingkungan sosial, ekonomi dan politik akan berpengaruh pada suatu kebijakan dimana tempat kebijakan itu di laksanakan.
- f. Strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan. Metode yang dipakai dalam mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang dipakai dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoritas atau demokratis.

### 2.1.1 Karakteristik Kebijakan

Menurut Anderson dalam ( Handoyo, 2012, p.16) secara umum kebijakan publik menunjukkan pada karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah. Anderson mengemukakan ada lima karakteristik umum kebijakan publik, pertama *Public policy is purposive, goal-oriented behavior rather than random or chance behavior* dengan arti bahwa setiap kebijakan memiliki tujuan tertentu dimana dalam pembuatan kebijakan tidak boleh asal-asalan atau karena adanya faktor tidak sengaja, jika tidak memiliki tujuan yang harus dicapai, maka kebijakan tidak perlu dibuat.

Kedua *Public policy consists of courses of action, rather than separate, discrete decision or actions, performed by government officials.*

Kebijakan publik terdiri dari serangkaian tindakan, bukan keputusan atau tindakan terpisah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Suatu kebijakan yang tidak berdiri sendiri atau terpisah dari kebijakan lainnya dimana tertuju pada berbagai arahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam

masyarakat dan ditujukan untuk implementasi, interpretasi, dan penerapan hukum. Ketiga *Policy is what government do, not what they say will door what they intend to do*. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang mereka katakan akan menghalangi apa yang ingin mereka lakukan.

Keempat *Public policy may be either negative or positive* yang artinya bahwa kebijakan itu bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Dan Terakhir *Authoritative law is the foundation of policy*. Yang artinya kebijakan publik didasarkan pada hukum serta bersifat otoritatif dengan maksud bahwa Kebijakan dilandaskan dalam hukum sebab memiliki kekuatan dalam memaksa orang untuk menaati kebijakan.

### 2.1.2 Proses Kebijakan Publik

Seperti (Anderson, 1979 pp 23-24) sebagai spesialis dalam kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Formulasi Masalah (*Problem Formulation*) seperti apa masalahnya? Hal seperti apa yang membuat menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah itu bisa masuk dalam agenda pemerintah?
- b. Formulasi Kebijakan (*Formulation*) Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- c. Penentuan Kebijakan (*Adoption*) bagaimana pilihan karakteristiknya? kebutuhan atau tindakan apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan itu? Apa subansi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

- d. Implementasi (*Implementation*) Siapa yang terlibat dalam melakukan implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari kebijakan mereka buat?
- e. Penilaian/Evaluasi (*Evaluation*) Bagaimana tingkat kemajuan atau pengaruh kebijakan yang diperkirakan? Siapa yang menilai kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pencabutan kebijakan?

Selain itu (Howlet dan Ramesh,1979 p11) juga menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan antara lain :

- a) Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*), proses dimana suatu isu dapat menjadi perhatian pemerintah.
- b) Pengembangan/Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*), proses dimana pemerintah merumuskan pilihan kebijakan .
- c) Pembuatan Kebijakan (*Decision Making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk bertindak atau tidak.
- d) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil dan tujuan dari kebijakan.
- Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*), yakni proses pemantauan dan menilai hasil ataupun kinerja kebijakan yang dilaksanakan.

### 2.1.3 Unsur-Unsur Kebijakan

Suatu kebijakan yang dapat dirancang dan terlaksana secara efisien dan efektif tentunya memiliki unsur-unsur sebagai dasar pengambilan kebijakan. Unsur-unsur penting dari suatu kebijakan menurut Abidin dalam (Handoyo, 2012 ,pp 17-19) menemukan bahwa ada empat unsur, Pertama Tujuan kebijakan,

tujuan itu dapat diterima oleh banyak pihak. Tujuan yang baik harus bersifat rasional, dalam arti pilihan terbaik di antara beberapa pilihan yang dihitung berdasarkan kriteria yang relevan dan masuk akal. Kedua yaitu Masalah, masalah merupakan elemen penting dari sebuah kebijakan, dimana dalam penyelesaian sebuah masalah secara tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan total dalam suatu proses kebijakan yang dilaksanakan.

Ketiga Tuntutan, Indonesia merupakan Negara yang demokratis dalam hal ini masyarakat dapat memberikan pendapat atau partisipasi yang diberikan masyarakat dapat berupa dukungan, kritik, dan tuntutan. Adanya tuntutan dapat terjadi karena memiliki alasan tertentu, misalnya terabaikannya kepentingan satu kelompok dalam proses pembuatan kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah yang dipandang dapat merugikan oleh kepentingan kelompok masyarakat, dan munculnya kebutuhan baru setelah suatu permasalahan dapat diselesaikan atau tercapainya suatu tujuan. Terakhir dampak atau *outcomes* merupakan tujuan selanjutnya yang timbul sebagai pengaruh terhadap pencapaian tujuan tersebut. Dalam suatu kebijakan tentunya memiliki dampak baik itu berupa perubahan yang bersifat membangun maupun dampak yang dapat merugikan masyarakat dimana itu bisa terjadi tergantung dari proses kebijakan tersebut.

## 2.2 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah tahapan pelaksanaan dari suatu proses kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ripley dan Franklin (Handoyo, 2012, p.94 ) implementasi merupakan dapat terjadi sesudah disahkan oleh Undang-Undang yang dapat memberikan pengaruh atau otoritas

terhadap program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) maupun sejenis pengeluaran yang nyata (*tangible output*), Yang artinya suatu implementasi atau kebijakan yang umum dibuat berlandaskan pada peraturan dan keputusan yang diatur oleh Undang-Undang.

Tentunya dalam pembuatan suatu kebijakan memiliki tujuan/target atau sasaran yang hendak dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara, 2014, p. 232) Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Tindakan yang dimaksud merupakan usaha untuk mengubah sebuah keputusan menjadi tindakan yang operasional dalam kurun waktu tertentu baik itu dalam rangka melanjutkan usaha-usaha dalam pencapaian perubahan besar ataupun perubahan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan dalam (Kiwang, 2018, p. 36) implementasi yang berhasil merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan dan dikerjakan, dan untuk penghambat dari implementasi itu sendiri, Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan Sumber-sumber keuangan atau hambatan-hambatan waktu yang tidak memungkinkan.

Tugas implementasi menurut Grindle dalam (Handoyo, 2012, p. 95) menciptakan suatu mata rantai yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Artinya kegiatan yang berkaitan dengan

kebijakan pemerintah harus memperjelas dan mendukung pencapaian tujuan, jika tidak ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam analisis kebijakan.

Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat dilihat dari berbagai pandangan antara lain (Soebarsono 2005, pp 89 – 104): Teori George C .Edwards III (1980) Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan sarana untuk menyampaikan maksud dan tujuan kebijakan terhadap kelompok sasaran dalam kata lain target group sehingga meminimalkan distorsi implementasi.

2) Sumberdaya

Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa adanya sumber daya, maka kebijakan hanya tinggal di kertas dokumen saja. Implementasi tidak akan terlaksana secara efektif jika terjadi sumberdaya manusia maupun sumberdaya financial yang kurang memadai untuk mengimplementasikannya.

3) Disposisi

Disposisi merupakan sifat dan karakteristik yang ada dalam implementor, seperti: komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas atas implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

### 2.2.1 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Ada berbagai hambatan implementasi kebijakan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. (Gow dan Morss dalam Pasolong, 2010 p59) dalam bukunya yang berjudul. “Reformasi Pelayanan Publik (Teori, *Kebijakan* dan *Implementasi*)” mengungkapkan hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan.
2. Kelemahan kelembagaan.
3. Ketidakmampuan SDM dibidang teknis dan juga dibidang administrasi.
4. Kurangnya dalam bantuan teknis.
5. Kurangnya desentralisasi serta partisipasi.
6. Pengaturan waktu (*timing*).
7. Sistem informasi yang tidak mendukung;
8. Perbedaan agenda sasaran antar aktor; dan
9. Dukungan yang berkesinambungan.

Semua hambatan tersebut dapat dengan mudah dibedakan menjadi hambatan internal dan eksternal (Pasolong,2010 p59) hambatan internal dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang dipakai seperti sumber daya manusia, pendanaan, struktur organisasi, informasi, sarana ataupun fasilitas yang dimiliki, serta aturan, sistem dan prosedur yang harus digunakan. Sedangkan hambatan eksternal dapat dibedakan atas semua kekuatan yang memiliki pengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, serta kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan lain sebagainya.

## 2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

Dengan keberadaan suatu model akan mempermudah dalam memberikan sebuah pandangan tentang komponen- komponen apa saja dari objek, situasi atau proses yang sedang diteliti dan dilaksanakan. Ada banyak model implementasi kebijakan publik. Tentunya dalam setiap model implementasi memiliki keunggulan dan kelemahan. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini berasumsi bahwa implementasi kebijakan mengikuti garis lurus dari kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan.

Dalam model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Agustino pp141-144) ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, pertama Tujuan kebijakan dan standar yang jelas, yang artinya perincian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta kriteria untuk mengukur pencapaiannya. Kedua sumberdaya merupakan dana atau berbagai insentif yang dapat memfasilitasi keefektifan implementasi. Ketiga Karakteristik Lembaga/Organisasi Pelaksana merupakan kompetensi dan skala pengukuran instansi/agen pelaksana, tingkat kontrol hierarki kendali di unit pelaksana terendah pada saat pelaksanaan implementasi, dukungan politik, dari eksekutif dan legislatif, serta berkaitan dengan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan. Keempat Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, koordinasi adalah mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka asumsinya akan

sedikit kesalahan-kesalahan yang terjadi begitu juga dengan sebaliknya. Kelima Lingkungan politik, sosial, dan ekonomi, merupakan dalam sebuah implementasi kebijakan tentunya lingkungan sosial, politik dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dari implementasi tersebut, apakah ada sumberdaya ekonomi yang cukup, seberapa kuat dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan tersebut atau apakah elit politik mendukung dalam pelaksanaan implementasi tersebut. Dan yang terakhir sikap para pelaksana, dalam hal ini pengetahuan dan pemahaman tentang isi dan tujuan kebijakan, sikap atas kebijakan tersebut serta intensitas sikap.

Model proses implementasi yang dikemukakan Oleh Van Meter Dan Van Horn pada dasarnya tidak bermaksud mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah, namun lebih tepatnya itu untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program karena dalam suatu kebijakan mungkin di implementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansi yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena faktor lainnya.

### **2.3 Teori kemiskinan**

Kemiskinan merupakan sebagai suatu kondisi yang terjadi karena tidak terpenuhinya keinginan pokok, yaitu pangan, sandang, kesejahteraan, pendidikan dan lain-lain. Menurut Ritonga dalam (Tampongangoy,2021,p. 4) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan hidup yang belum berkecukupan yang dialami oleh individu atau keluarga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan yang paling kecil atau lebih baik dari rata-rata. Menurut Salim, dalam

(Hutapea, 2015, p. 13) orang miskin dapat dicirikan pertama, rata-rata tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, dan keterampilan. Kedua Memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Ketiga Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur dan menganggur (tidak bekerja). Keempat sebagian besar berada di daerah pedesaan atau daerah perkotaan tertentu dan kelima Kurangnya akses (dalam jumlah cukup) seperti dasar sandang, perumahan, kesehatan, air minum, pendidikan, angkutan, fasilitas komunikasi, dan kesejahteraan sosial lainnya.

Kemiskinan dapat menjadi keadaan seseorang/sekelompok orang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya untuk memelihara serta menciptakan kehidupan yang terhormat. Miskin hakekatnya adalah permasalahan yang sudah ada sejak manusia diciptakan.

Gilder, Murray, dan Hernstein(dalam Baidhaw, 2015, p. 58) mengatakan bahwa orang miskin secara genetik dibuat untuk menjadi kelompok yang berada di bawah tatanan kekuasaan sosial. Orang miskin karena mereka memiliki IQ dan kapasitas mental yang rendah dan secara ideologis ditahbiskan/ditakdirkan menjadi miskin., kemiskinan ini telah menjadi masalah yang kompleks dari waktu kewaktu dan telah menjadi bahan pertimbangan dari berbagai kalangan akademisi maupun profesional. Menurut Griffin dalam (Mujiyadi Suradi, 2009, p. 8) menyatakan bahwa kemiskinan terjadi pada umumnya dengan adanya kelaparan, kekurangan gizi, rumah yang tidak layak atau sempit, pendidikan yang tergolong rendah, masih sulit untuk mendapatkan akses kesehatan yang bagus. Sejalan dengan pendapat Castellsdalam (Sitanggang, 2019, p. 16) yang menyatakan bahwa, kemiskinan mungkin merupakan tingkatan kehidupan yang paling bawah.

### 2.3.1 Ukuran Kemiskinan

Menurut Nugroho dalam (Tirtado, 2018, p. 10) menyatakan bahwa: Ukuran obyektif kemiskinan bergeser secara luas, sehingga penting untuk memperhatikan secara bersama-sama dasar penggunaan dan penentuan alat ukur tersebut. Keperluan manusia berubah-ubah yang mengakibatkan untuk memutuskan garis kemiskinan yang berkurang dalam hal keuangan tidak akan berbicara dengan masalah kemiskinan yang sebenarnya.

Ellis dalam (Tirtado, 2018, p. 11) menyatakan bahwa persoalannya bukanlah ukuran kemelaratan akan tetapi jenis dimensi yang ada dalam gejala yang tidak berkecukupan antara lain: pertama yang paling menonjol adalah kemiskinan memiliki unsur struktur. Pengukuran ukuran ini ditunjukkan dalam berbagai keperluan esensial manusia yang berupa kain, sandang pangan, kenyamanan, pendidikan dan lain-lain. Kedua Momen yang artinya kemiskinan memasukkan pada ukuran sosial budaya.

Budaya kemiskinan dapat diwujudkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalisme, ketidak berdayaan dan lain sebagainya. Ketiga, kemiskinan memasukkan ukuran dasar atau politik, artinya individu yang mengalami kemiskinan finansial pada dasarnya karena menghadapi kemiskinan dasar dan politik, yang artinya kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tidak memiliki implikasi untuk diikutsertakan dalam proses politik, tidak memiliki kontrol politik, sehingga mereka melibatkan posisi dasar sosial yang paling sedikit.

Badan Pusat Statistik (2019) juga menawarkan opsi untuk menghitung garis kemiskinan dengan menilai jumlah kalori minimal yang harus dikonsumsi setiap

individu dalam sehari. Setiap orang harus mengkonsumsi 2.100 kilokalori setiap hari, menurut pemerintah. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi ( padi, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak). Hasilnya BPS telah menetapkan tingkat komoditi yang rill dikonsumsi penduduk miskin setara 2.100 kilokalori perkapita per hari, dan untuk kebutuhan non-makanan seperti perumahan, bahan bakar, lampu listrik, pendapatan air bersih, kesehatan, sandang dan pendidikan diwakili oleh 51 komoditi diperkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Persyaratan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam angka Rupiah. Karena harga kebutuhan pokok bervariasi, tingkat kemiskinan yang ditetapkan BPS akan terus berubah.

### **2.3.2 Faktor Kemiskinan**

Menurut kartasmita dalam (RatnaSari & Firdayetti, 2019, p. 39) keadaan kemiskinan dapat terjadi karena beberapa faktor, pertama Rendahnya kualitas pendidikan, tingkat pendidikan menyebabkan terbatasnya keterampilan pengembangan diri dan menyebabkan terbatasnya memanfaatkan peluang dalam mendapatkan dunia pekerjaan. Kedua Taraf kesehatan dan gizi yang rendah, menyebabkan stamina fisik, kemampuan berpikir dan inisiatif yang rendah.

Ketiga keterbatasan lapangan pekerjaan, selain dari kemiskinan, kondisi kesehatan yang buruk, kemiskinan juga diperburuk oleh terbatasnya kesempatan kerja. Selama masih ada lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, dan masih ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. Dan terakhir kondisi terisolasi banyak masyarakat miskin yang tidak berdaya secara ekonomi karena terisolasi dan terpencil. Karena tinggal di daerah terpencil sehingga sulit atau

tidak terjangkau bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan layanan kemajuan lainnya.

## 2.4 Program Keluarga Harapan

Dalam UUD 1945 “Negara memelihara anak-anak miskin dan terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang rentan dan kurang mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab dan menyediakan fasilitas pelayanan sosial yang layak. Program keluarga Harapan adalah salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga kurang mampu dan tidak berdaya dengan kondisi tertentu yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Program ini memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga sangat miskin (RTSM). Sebagai suatu kecanggungan, RTSM dituntut untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan upaya memajukan sumberdaya manusia (SDM), khususnya pendidikan dan kesejahteraan.

Dengan adanya program Keluarga Harapan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan khususnya poin untuk menghilangkan kemiskinan antargenerasi. Program ini diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi pada tingkat kemiskinan dan memberdayakan otonomi penerima manfaat bansos, yang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sasaran terbanyak dari PKH ini adalah membuka akses KPM bagi ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas/ layanan kesehatan (fakes) dan anak usia sekolah dalam memanfaatkan fasilitas/ layanan pengajaran (fasdik) yang dapat diakses didekat rumahnya.

### 2.4.1 Tujuan Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan bertujuan untuk mengurangi angka dan memutuskan mata rantai kemiskinan, memajukan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah perilaku RTSM (rumah tangga sangat miskin) yang pada umumnya kurang mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut memiliki tujuan Berdasarkan peraturan menteri sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Pertama Meningkatkan taraf hidup KPM (keluarga penerima manfaat) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kedua Mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Ketiga Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, yang artinya dengan bantuan sosial yang secara tunai masyarakat dapat membeli perlengkapan sekolah anaknya, serta dapat membuka usaha kecil-kecil untuk menambah penghasilan ekonominya. Keempat Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dengan maksud masyarakat dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dengan baik dan kebijakan ini sesuai dengan sasaran sesuai dengan harapan pemerintah dan kelima mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. Dalam penerimaan PKH ini dibagi berdasarkan komponenya dimana komponen tersebut adalah komponen kesehatan, pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial.

**TABEL 1**  
**KOMPONEN PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

No	Komponen	Sasaran	Kewajiban
1	Kesehatan	Ibu hamil	Melakukan pemeriksa kehamilan sebanyak minimal 4 kali, selama mas kehamilan.
		Ibu melahirkan	Proses kelahiran harus ditolong oleh bidan Desa.
		Ibu nifas	Ibu yang telah melahirkan harus melakukan pemeriksaan setidaknya 2 kali sebelum usia bayi 28 hari.
		Bayi usia 0-11 bulan	Anak usia dibawah 1 tahun harus diimunisasi lengkap dan ditimbang secara rutin setiap bulannya
		Bayi usia 6-11 bulan	Mendapat suplemen vit.A
		Anak usia 1-5 tahun	Dimonitor tumbuh kembangnya & mendapat vit.A 2x setahun
		Anak usia 5-6 tahun	Ditimbang berat badannya setiap bulan & mengikuti pendidikan usia dini (PAUD)
2	Pendidikan	Usia 7-15 tahun	Harus terdaftar dalam lembaga pendidikan dasar(SD,SMP) mengikuti kehadiran dari belajar efektif sebanyak 85%.
		Peserta PKH memiliki anak usia 15-18 Tahun belum menyelesaikan pendidikan dasar	Diwajibkan anak tersebut didaftarkan kesatuan pendidikan regular (paket A,dan B).
3	Kesejahteraan Sosial	Anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan.	Dapat mengikuti program SD,SMP.
		Lanjut usia	Wajib mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal sekali setahun. KPM harus hadir dalam pertemuan kelompok&P2K2 setiap bulannya dan KPM yang tidak memenuhi kewajiban akan diberi sanksi.

*Sumber:* Kantor UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan)  
Kabupaten Samosir Tahun (2022)

#### 2.4.2 Dasar Hukum Program Keluarga Harapan ( PKH)

Dasar hukum yang menjadi dasar program keluarga harapan (PKH) sebagaimana dalam Undang-Undang No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Undang- undang No 8 tahun 2016 penyandang disabilitas. Peraturan pemerintah No 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Peraturan presiden No 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Peraturan presiden No 46 tahun 2015 tentang kementerian sosial lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 86. Impress Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Korupsi Poin Lampiran Ke 46 Tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga. SK Menteri Sosial RI Nomor 294/ HUK/2016 Tentang Indeks Dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2016. Peraturan menteri sosial No 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (2016). Yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yakni keputusan menteri koordinator dibidang kesejahteraan rakyat selaku ketua No:31/kep/MENKO/-KESRA/IX/2007, tentang “Tim pengendali program keluarga harapan” tanggal 21 September 2007. Keputusan menteri sosial republik Indonesia No.

02A/HUK/2008 tentan “Tim pelaksana program keluarga harapan tahun 2008”  
tanggal 08 Januari 2008 dalam (Fahmi & Anwar, 2020, p. 176).

**TABEL 2**  
**PENELITIAN TERDAHULU**

<b>No</b>	<b>Judul Penelitian, Nama Penelitian dan Tahun</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Persamaan dan Perbedaan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pelaksanaan PKH Dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan Oleh Uppkh Kecamatan Di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.(Ida Yunani Destianti 2014)	Bagaimanakah pelaksanaan dalam meningkatkan taraf kesehatan, bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PKH dalam meningkatkan taraf kesehatan, bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PKH dalam meningkatkan taraf kesehatan	Dalam penelitian terdahulu persamaannya sama-sama membahas tentang PKH dan perbedaannya penelitian terdahulu membahas PKH yang berfokus pada kesehatan, sedangkan penulis membahas PKH dalam mengurangi tingkat kemiskinan.	Jurnal
2	Implementasi PKH Dikelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.(Venty Butar-Butar 2020)	Bagaimana Implementasi PKH Di Desa Pintusona Kecamatan pangururan kabupaten samosir	Dalam penelitian terdahulu persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan perbedaannya dalam penelitian terdahulu menggunakan teori David C kourten dan penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn	Skripsi
3	Pemanfaatan dana bantuan pendidikan PKH dalam upaya pemberdayaankeluarga penerima manfaat di kelurahan lebung gajah kota Palembang.(Riska Trinanda,2021)	Bagaimana Pemanfaatan Dana Bantuan Pendidikan PKH Dalam Upaya Pemberdayaan KPM di Kelurahan Lebung Gajah Kota Palembang	Dalam penelitian terdahulu persamaannya sama-sama berfokus pada manfaat PKH pada perbaikan SDM, dan perbedaannya menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif	Skripsi

4	Analisis Implementasi PKH Untuk Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang (Revan Ravanelly, 2016)	Bagaimana Implementasi PKH Untuk Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang?	Dalam penelitian terdahulu persamaannya sama-sama berfokus pada PKH dalam memutus rantai kemiskinan dan perbedaannya dalam penelitian terdahulu menggunakan teori George C. Edward III dan penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn	Jurnal
5	Implementasi PKH Di Kecamatan Binongko Kabupaten Warkatobi (La Ode Muhammad Elwan 2018)	Bagaimana Implementasi PKH Di Kecamatan Binongko Kabupaten Warkatobi?	Dalam penelitian terdahulu persamaannya berfokus pada manfaat PKH pada memutus rantai kemiskinan dan perbedaannya menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif	Jurnal

## 2.5 Kerangka Berpikir

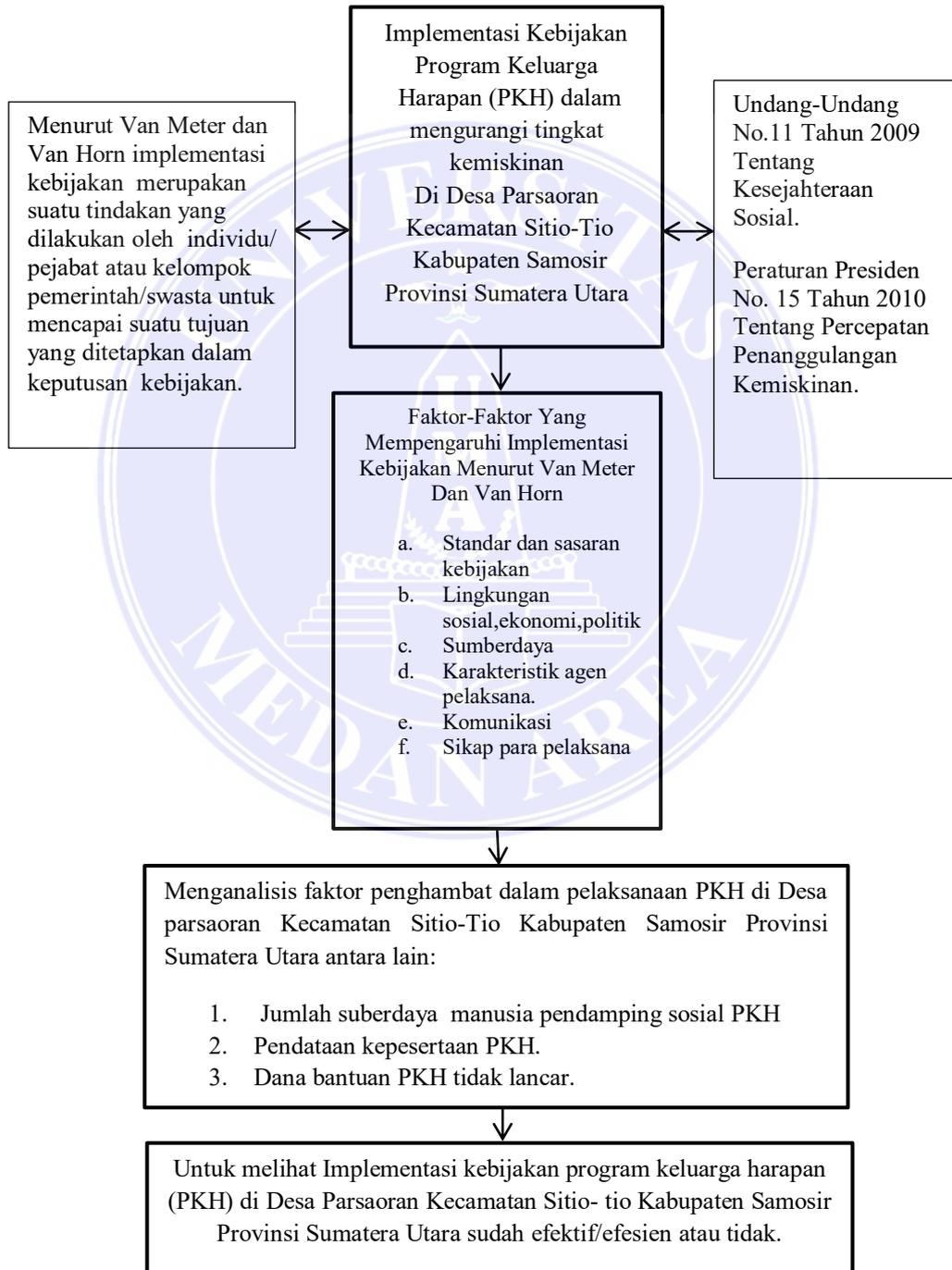
Kerangka berpikir merupakan sebuah gambaran berupa konsep yang mana didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dalam kerangka berpikir adanya hubungan teori dengan berbagai faktor yang sudah diidentifikasi sebagai masalah yang penting yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai permasalahan topik penelitian.

Menurut Syamsul Arifin dalam (Simanjuntak, 2017, p. 10) Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual tentang teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Dengan adanya kerangka berpikir akan mempermudah dalam memahami isi dari suatu penulisan karya ilmiah. Dalam hal ini kerangka berpikir/kerangka

pemikiran dapat memberikan manfaat sebagai dasar rumusan hipotesis, adanya hubungan yang ditunjukkan dengan tanda panah, dan dalam kerangka berpikir menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok sub variabel pokok/ pokok masalah yang ada dalam penelitian.

## BAGAN 1

### KERANGKA BERPIKIR



### 2.5.1 Penjelasan Kerangka Berpikir

Diantara kebijakan program-program sosial pemerintah dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan tersebut, salah satu program yang diharapkan tepat sasaran adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dimana tujuan utama dalam kebijakan program keluarga harapan ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Seperti yang dikemukakan oleh Van meter dan Van Horn dimana implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Dengan adanya kebijakan program keluarga harapan ini didukung oleh undang-undang No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dan juga Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Program Keluarga Harapan yang sering disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan program keluarga Harapan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, seperti yang dikemukakan oleh Van meter dan Van Horn dimana implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan, dan didukung oleh undang-undang No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dan juga Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam teori Van Meter dan Van Horn ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti : Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Sikap para pelaksana serta Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hal ini peneliti menganalisis faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara antara lain yang pertama, jumlah sumberdaya manusia pendampingsosial PKH, hal ini berpengaruh pada pelayanan yang cepat maupun lambat terhadap masyarakat baik itu dalam pencairan dana bantuan PKH maupun dalam pendataan para peserta PKH.

Yang kedua pendataan kepesertaan PKH, yang artinya dengan pendataan yang tepat dan sesuai dengan persyaratan kelayakan dalam penerima bantuan PKH akan menghindari ketidak tepat sasaran. Yang ketiga jalinan komunikasi antara petugas dengan masyarakat, dengan menjalin komunikasi yang baik dan memberikan informasi yang cepat dan tepat contohnya kapan bantuan disalurkan, apa saja persyaratan dalam penyaluran dana bantuan sosial PKH serta membimbing masyarakat dalam pelaksanaan PKH. Hal ini digunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan implementasikebijakan program keluarga harapan (PKH) di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir sudah efektif dan efisien, atau tidak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan dari program keluarga harapan melalui informasi dan data yang yang diperoleh dalam penelitian ini yang bersumber dari masyarakat anggota penerima manfaat PKH .

Pendapat Moleong (Sugiyono, 2013, p. 6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (contohnya perilaku, persepsi, dan lain sebagainya) secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara serta untuk mendapatkan bukti dan dokumentasi berupa foto rumah penerima bantuan program keluarga harapan ini maka penulis akan berkunjung ke beberapa rumah tangga penerima bantuan PKH ini. Dengan alasan memilih lokasi tersebut karena adanya ketertarikan akan fenomena yang terjadi dimasyarakat tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir serta ingin mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan program keluarga harapan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.

Desa Parsaoran adalah kampung dari penulis, sehingga akan lebih mudah berinteraksi antara peneliti dengan responden, dengan demikian akan mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian dan memperoleh data dari masyarakat dan juga petugas dari pelaksana program keluarga harapan.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Rentang waktu yang akan digunakan dalam proses penelitian ini berkisar satu bulan.

**TABEL 3**  
**WAKTU PENELITIAN**

No	Uraian Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	Penyusunan Proposal	■	■									
2	Seminar Proposal			■								
3	Perbaikan Proposal			■								
4	Pengambilan Data Penelitian			■								
5	Penyusunan Skripsi			■								
6	Seminar Hasil								■			
7	Perbaikan Skripsi								■	■		
8	Sidang Meja Hijau											■

### 3.3 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang mengetahui informasi mengenai objek yang sedang diteliti. Sumber dari penelitian ini merupakan dari hasil wawancara secara langsung yang sering disebut dengan narasumber. Dalam penelitian ini mendapatkan sumber informasi yang terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Informan dalam penelitian sebagai berikut:

#### a. Informan Kunci

Yang dimaksud dengan informan kunci merupakan orang-orang yang mengetahui serta memahami tentang informasi penting dalam hal permasalahan serta objek yang diteliti. Yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah ahli muda penyuluh sosial Bapak James Nainggolan SPd. Koordinator PKH kabupaten samosir Bapak Damenra Naibaho A.Md bapak kepala Desa Parsaoran (Bapak Marisan Tamba) dan petugas pendamping program keluarga harapan (Ibu Linduani boru Tamba S.E ) di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.

#### b. Informan Utama

Informan utama merupakan orang-orang yang ikut serta dan mengalami secara langsung dengan objek yang akan diteliti. Adapun Informan utama untuk penelitian ini merupakan beberapa keluarga penerima bantu program keluarga harapan (Ibu Romantika Nainggolan, Ibu Delvi modesta Situmorang, Ibu Hotlida Sinaga. Ibu Heppy Sitinjak, Ibu Kristina situmorang, Ibu Senteria Haro) di lokasi penelitian.

## c. Informan Tambahan

Adapun Informan tambahan merupakan orang-orang yang benar-benar memberikan informasi maupun data meskipun mereka tidak ikut serta secara langsung dalam hal yang diteliti. Dalam penelitian ini informan tambahan adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak Lukman Tamba.

**TABEL 4**  
**INFORMAN PENELITIAN.**

<b>NO</b>	<b>Informan</b>	<b>Informasi yang Dicari</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Metode Pengumpulan Data</b>
1	Badan Penyuluhan Sosial	Gambaran lembaga, latar belakang program kegiatan, hasil yang telah dicapai dan faktor penghambat	1	Wawancara bebas terstruktur, dokumentasi
2	Unit pelaksana program (UPPKH) Kabupaten Samosir	Gambaran lembaga, latar belakang program kegiatan, hasil yang telah dicapai dan faktor penghambat	1	Wawancara bebas terstruktur, dokumentasi, observasi
3	Petugas pendamping PKH yang mendampingi Desa Parsaoran	Gambaran lembaga, latar belakang program kegiatan, hasil yang telah dicapai dan faktor penghambat	1	Wawancara bebas terstruktur, dokumentasi
4	Kepala Desa Parsaoran	Gambaran lembaga latar belakang program kegiatan, hasil yang telah dicapai.	1	Wawancara bebas terstruktur, dokumentasi
5	Masyarakat penerima bantuan PKH	Hasil dari program kegiatan PKH di lokasi penelitian	6	Wawancara bebas terstruktur, observasi langsung, dokumentasi
6	BPD	Mencari informasi terkait permasalahan yang ada dalam masyarakat yang berkaitan dengan program	1	Wawancara bebas terstruktur, observasi, dokumentasi

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013, p. 242) yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam mendapatkan informasi. Tanpa mengetahui strategi dalam mengumpulkan informasi, analisis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi ukuran informasi yang ditetapkan. Untuk mendorong mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi dapat dikatakan melakukan pengamatan dan *survey* secara langsung ke lokasi penelitian dalam rangka mendapatkan informasi dari suatu yang akan diteliti. Sama seperti yang dikemukakan oleh Menurut Sutrisno Hadi (Sugiyono, 2013, p. 145) dengan memberikan pendapat bahwa observasi merupakan salah satu persiapan yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Peneliti terlebih dahulu mengadakan pengamatan langsung kelokasi penelitian yang bertempat di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Povinsi Sumatera Utara.

#### 2. Wawancara.

Untuk penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan akurat untuk pengumpulan data wawancara tidak terstruktur akan dilakukan secara detail hingga memperoleh keterangan yang diharapkan oleh peneliti. Menurut

(Pasolong,2013 p132) “wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung”.

Namun demikian wawancara juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang ada seperti telepon dan internet. Beberapa pertanyaan diajukan kepada berbagai pihak penting dan berkompeten dalam isu-isu dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang tepat serta akurat. Pertanyaan yang ditanyakan kepada informan yang berhubungan pengalaman informan, tanggapan informan, pengetahuan informan dan latar belakang informan yang memberikan informasi terkait dengan hal yang ingin diteliti oleh peneliti (Sugiyono, 2013, p. 320).

### 3. Studi literature

Studi literature merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan digunakan untuk mendapatkan data tentang spekulasi dan ide-ide yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Spekulasi dan gagasan terkait pelaksanaan program keluarga Harapan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Desa Parsaoran kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir. Studi literature ini didapatkan baik dari penelitian terdahulu, maupun dari informasi jurnal, berita media masa dan sumber ilmiah lainnya.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan oleh sipeneliti yang terdiri dari catatan-catatan penting, transkrip, buku, dan lainnya. Dokumentasi ini menjadi bukti resmi yang harus dipertanggung jawabkan.

## 5. Triagulasi

Triagulasi dapat berupa prosedur pengumpulan informasi yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber yang ada. Dalam proses triagulasi sebagai pegangan yang kuat dibuktikan dari hasil catatan lapangan, persepsi, wawancara dan dokumentasi yang menunjuk pada pengembangan dari suatu penelitian (Yuliani,2018 p.87).

### 3.5 Teknik Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu metode mencari dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara efisien, dengan mengatur informasi ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit terpenting menjabarkan , mengaturnya ke dalam desain, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari , dan menarik kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2013, p. 137).

Dalam teknik menganalisis data deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2016,p.247) ada beberapa langkah dalam menganalisis data sebagai berikut :

- a) Pengumpulan Data, yang dimaksud dengan pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan dalam mencari dan mengumpulkan informasi dengan macam cara, seperti dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung, melakukan wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya.
- b) Reduksi Data, Reduksi data merupakan menekan pada hal yang paling utama dari data yang sudah diambil oleh peneliti atau hal-hal yang bersifat fokus dan penting untuk dicari inti pokok atau tema dan polanya serta

membuang yang tidak perlu. Dalam proses ini berlangsung pada saat pertanyaan awal dimulai sampai dengan data penelitian terkumpul.

- c) Penyajian Data, Sesudah data direduksi untuk langkah berikutnya yaitu penyajian data/ mendisplaykan data yang dibuat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, yang dimana memiliki tujuan untuk memudahkan serta merencanakan kerja yang akan selanjutnya dilakukan berdasarkan apa yang telah dipahami.
- d) Pengambilan Keputusan/mengambil kesimpulan, Kesimpulan adalah usaha untuk menemukan makna, serta klarifikasi yang dilakukan terhadap informasi yang dianalisis dan dengan berusaha menemukan hal-hal yang vital. Setelah informasi ditampilkan, keputusan/verifikasi akan dibuat yang membuat kesimpulan singkat yang semula kurang jelas menjadi lebih jelas dan poin demi poin, artinya meninjau ulang catatan yang diperoleh tidak valid untuk mendapatkan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian .

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Implementasi kebijakan program keluarga harapan di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara banyak mengalami kendala dan belum diimplementasikan dengan baik. Dalam standar dan sasaran penerima bantuan program keluarga harapan masih banyaknya masyarakat yang layak menerima bantuan Program keluarga harapan tidak mendapatkan bantuan ini dikarenakan pendataan untuk peserta penerima bantuan PKH belum optimal dilaksanakan, dimana banyak masyarakat memiliki komponen dan layak sebagai penerima PKH tetapi belum terdaftar di data terpadu kementerian sosial (DTKS). Selain itu ditinjau dari sikap para pelaksana (petugas pendamping PKH) belum menunjukkan sikap profesional dalam bekerja, adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya petugas pendamping lebih mengutamakan pelayanannya terhadap desa asalnya dibandingkan desa yang lainnya. Pencairan dana bantuan PKH dari kementerian sosial belum terlaksana secara efektif dan akurat dimana dana bantuan program keluarga harapan di Desa Parsaoran masih sering mengalami kemacetan.

Faktor pendukung pelaksanaan program keluarga harapan di Desa parsaoran antara lain Peran aktif Dinas Sosial kabupaten samosir dalam melakukan koordinasi secara rutin setiap bulannya dengan petugas pendamping PKH kecamatan, koordinator dan operator PKH sehingga kegiatan P2K2 relative berjalan dengan lancar. Adanya komitmen yang kuat antara pemerintah pusat dengan daerah, yang mana pemerintah daerah/ kepala Desa Parsaoran sangat

mendukung program keluarga harapan. Adanya aturan yang jelas dalam mekanisme pelaksanaan program dan adanya jaminan dalam memperbaiki SDM dikalangan masyarakat kurang mampu. Peran serta BPD dalam menggandeng masyarakat serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dikalangan masyarakat yang kurang mampu.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH di Desa Parsaoran beberapa masyarakat masih kesulitan dalam mencairkan dana bantuan PKH dikarenakan masyarakat belum memahami cara menggunakan ATM dan jauhnya jarak ATM dari desa ke kota. Tingkat pendidikan RSTM yang masih rendah, Keterbatasan petugas pendamping dalam mengajari KPM dalam pelaksanaan P2K2, karena petugas pendamping sendiri tidak memiliki anak. Kurangnya fasilitas dalam pelaksanaan PKH ini mulai dari sarana dan prasarana seperti pemerintah tidak menyediakan kendaraan bagi pelaksana, pemerintah juga belum menyediakan komputer untuk para petugas pendamping PKH di Desa Parsaoran, serta belum adanya ruangan khusus dalam pelaksanaan PKH, sehingga masih menggunakan rumah masyarakat dalam mengadakan pertemuan. Masyarakat kurang ontime dan kurang aktif dalam pelaksanaan pertemuan. Faktor komunikasi yang belum tersampaikan dengan jelas karena kendala jaringan yang tidak ada. Pemanfaatan dana bantuan PKH oleh KPM yang tidak sejalan dengan tujuan PKH, Kurangnya partisipasi petugas kesehatan mengikuti kegiatan kunjungan bulanan yang diselenggarakan oleh petugas PKH untuk mengevaluasi pelaksanaan kewajiban peserta PKH dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehubungan dengan implementasi kebijakan program keluarga harapan (PKH) di desa parsoran peneliti akan memberikan beberapa masukan, yaitu :

1. Masih minimnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, alangkah baiknya pemerintah melengkapai fasيلات dalam pelaksanaan program keluarga harapan ini, baik menyediakan komputer untuk petugas pendamping PKH, memfasilitasi kendaraan pelaksana PKH dan menyediakan ruangan untuk melakukan pertemuan KPM. Kerjasama pihak kesehatan, dengan petugas pendamping perlu ditingkatkan.

Lebih memaksimalkan sanksi yang tegas terhadap KPM yang tidak memenuhi komitmen dalam pelaksanaan pertemuan serta dalam pemanfaatan dana bantuan PKH.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anderson, James.1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Agustino.2008. *Dasar- Dasar Kebijakan Public*. Alfabeta. Bandung
- Anggara, Sahya.2014. *kebijakan publik*. Bandung:cv Pustaka Setia.
- Baidhawya, Z. 2015. *Kemiskinan Dan Kritik Atas Globalisme Neo-Liberal* (F. Nabhan (ed.); 1st ed.). LP2M-press,Institut Agama Islam Negeri (IAN) Salatiga.
- Dunn, W. N.2003. *Pengantar analisis kebijakan public(terjemahan)*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Handoyo E. 2012. *kebijakan publik*. Semarang:Widya Karya.
- Howlett, Mand Ramesh.1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles And Policy Subsystem*. New York: Oxford University Press.
- Hutapea, B. 2015. *Program Keluarga Harapan di Indonesia : Dampak Pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi* (Issue December 2012).
- Pasolong.2010. *Reformasi Pelayanan Publik ( Teori, Kebijakan dan Implementasi)*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Soebarsono A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Cv.Alfabeta.
- Sugiyono. (2016).*Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*.Bandung: PT. Alfabet.
- Suradi & Mujiyadi, B. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Lima Provinsi*.
- Tachjan,H.2006. *Implementasi kebijakan publik*. Bandung: Asosila Ilmu Politik Indonesia (AIPI).

## Jurnal.

- Destianti,I.(2014) *Pelaksanaan PKH Dalam Meningkatkan Taraf Kesehatan Oleh Uppkh Kecamatan Di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.*
- Elwan Muhammad. L,2018. *Implementasi PKH Di Kecamatan Binongko Kabupaten Warkatobi*
- Fahmi, N., & Anwar, K. 2020. *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Di Desa Berancah Kecamatan Bantan. Bertuah: Journal of Sharia and Islamic Economics, 1(2).*
- Habibah, A. N., Ghafur, R. A., Anggraeni, E., & Malik, A. 2020. *Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 6(2).*
- Kiwang, A. S. (2018). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Kupang. Journal of Politics and policy, 1(1).*
- Kontu, E. Kiyai, B, & Tampongangoy, D. 2021. *Pengaruh Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Picuan Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Administrasi Publik, 7(107).*
- Nainggolan, E. (2020). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya (JMBEP).6(2).*
- Rakhmat, R., & Fakih, F. 2019. *Dinamika Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK). 1(2).*
- RatnaSari, E., & Firdayetti, F. 2019. *Analisis Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah Dan (Pajak Impor) Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. Media Ekonomi, 26(1).*
- Ravanelly,R.2016. *Analisis Implementasi PKH Untuk Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*
- Simanjuntak, D. S., Nadapdap, K. M. N., & Winarto, W. (2017). *Pengaruh Persepsi Penilaian Prestasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Jurnal Manajemen. Volume 3 Nomor 2*
- Syawie, M. 2011. *Kemiskinan dan kesenjangan sosial. Sosio Informasi, 16(3).*
- Yuliana, W.2018. *Metode Penelitian Dekriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling.Jurnal Quanta, 2(2).*

## Skripsi

Butar-Butar, V. (2020). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.*

Tirtado, S. (2018). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Medan Selayan..*

Trinanda, R.(2021) *Pemanfaatan dana bantuan pendidikan PKH dalam upaya pemberdayaan keluarga penerima manfaat di kelurahan lebong gajah kota Palembang.*

## Internet

<http://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.

<https://kemensos.go.id>

<https://samosirkab.bps.go.id/statictable/2016/08/04/7/luas-wilayah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-di-kabupaten-samosir-tahun-2015.html>.

<https://samosirkab.bps.go.id/pressrelease/2020/12/28/143/berita-resmi-statistik-indikator-kemiskinan-kabupaten-samosir-maret-2020.html>.

## Undang-undang

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009

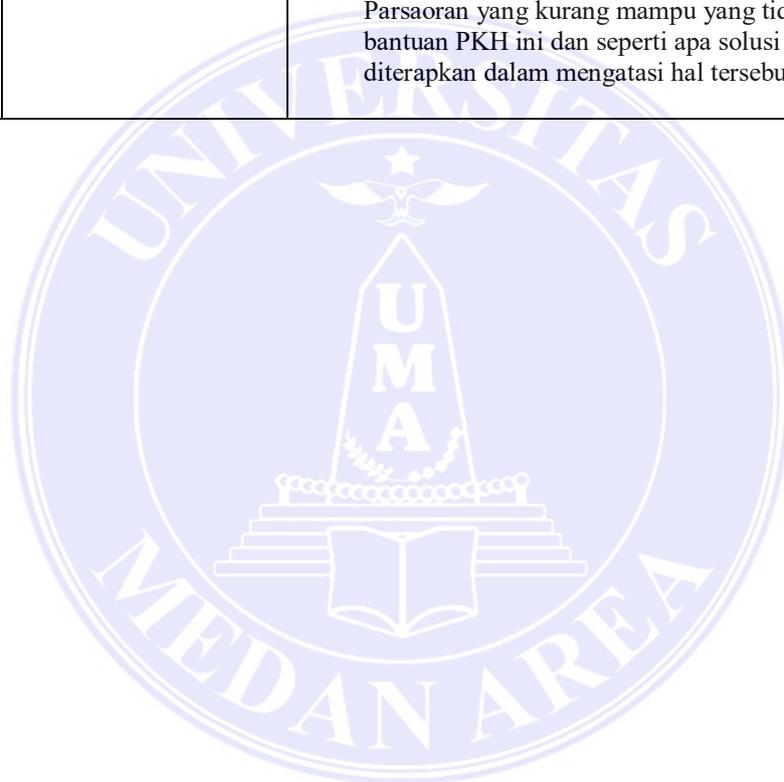
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

NO	Indikator	Pertanyaan
1	Standar dan Sasaran Kebijakan	<p><b>Wawancara dengan Informan Kunci.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kriteria seperti apa yang menjadi penerima bantuan keluarga harapan ini?</li> <li>Apa yang menjadi sasaran dan tujuan dari program keluarga harapan ini?</li> <li>Apakah penerima bantuan Program keluarga harapan di Desa Parsaoran sudah sesuai dengan komponen PKH?</li> </ol> <p><b>Wawancara dengan Infoman Utama.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apa manfaat dari bantuan program keluarga harapan terhadap KPM?</li> </ol>
2	Sumber daya	<p><b>Wawancara dengan informan kunci</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Siapa yang memilih Ibu (petugas pendamping PKH) untuk menjadi petugas PKH di Kecamatan Siti0-Tio?</li> <li>Apakah sebelumnya petugas pendamping PKH di berikan pelatihan oleh pemerintah dan bagaimana jadwal sosialisasi kepada masyarakat KPM?</li> <li>Darimana sumber dana PKH ini diperoleh dan berapa besaran bantuan PKH yang diterima oleh masyarakat?</li> </ol> <p><b>Wawancara dengan Infoman Utama.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berapa besaran bantuan PKH yang ibu terima?</li> </ol>
3	Karakteristik organisasi pelaksana	<p><b>Wawancara dengan informan kunci</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Apa yang menjadi syarat sebagai petugas pendamping?</li> </ol>
4	Komunikasi dan aktivitas pelaksana	<p><b>Wawancara Dengan Informan Kunci</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana cara petugas pendamping dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat KPM berkaitan dengan PKH ini?</li> <li>Bagaimana jalinan komunikasi antara Dinas Sosial dengan petugas pendamping PKH serta kepala Desa dalam pelaksanaan program keluarga harapan ini?</li> </ol> <p><b>Wawancara Dengan Informan Utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Media apa yang paling efektif digunakan petugas pendamping PKH dalam menyampaikan informasi?</li> <li>Apakah informasi yang disampaikan sudah dipahami?</li> </ol>
5	Sikap para pelaksana	<p><b>Wawancara dengan informan utama</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana sikap para petugas pendamping PKH di Desa Parsaoran dalam melayani masyarakat penerima bantuan PKH bu?</li> </ol> <p><b>Wawancara dengan informan kunci</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana sikap para pelaksana PKH baik itu Dinas Sosial, koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan terhadap petugas pendamping PKH di Desa Parsaoran?</li> </ol>
6	Lingkungan sosial dan ekonomi	<p><b>Wawancara dengan informan kunci</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kondisi seperti apa yang dialami oleh masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Parsaoran?</li> </ol>

		<p>b. Jika masyarakat penerima bantuan PKH sudah mengalami peningkatan ekonomi apakah apakah akan dikeluarkan? Adakah masyarakat Desa Parsaoran dengan kesadaran sendiri mengundurkan diri sebagai penerima bantuan PKH karena sudah mengalami peningkatan ekonomi?</p>
7	Faktor pendukung dan penghambat	<p><b>Wawancara dengan informan kunci</b></p> <p>a. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan PKH ini?</p> <p>b. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Parsaoran?</p> <p><b>Wawancara dengan informan utama</b></p> <p>a. Adakah kesulitan yang ibu hadapi dalam memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan PKH ini?</p> <p><b>Wawancara dengan informan Tambahan</b></p> <p>a. Bagaimana peran BPD dalam menyikapi permasalahan yang ada terkait masyarakat Desa Parsaoran yang kurang mampu yang tidak menerima bantuan PKH ini dan seperti apa solusi yang sudah diterapkan dalam mengatasi hal tersebut?</p>



**Gambar 1**  
**Bapak James Nainggolan SPd ( sebelah kiri)**  
**Ahli Muda Penyuluh Sosial**



**Gambar 2**  
**Bapak Damenra Naibaho D3**  
**Koordinator PKH**



**Gambar 3**  
**Petugas pendamping PKH di Desa Parsaoran**  
**Ibu Anita boru Tamba S.E**



**Gambar 4**  
**Kepala desa parsaoran**  
**Bapak Marisan Tamba**



**Gambar 5**  
**Ketua BPD Desa Parsaoran**  
**Bapak Lukman Tamba**



**Gambar 6**  
**Penerima Bantuan PKH**  
**Ibu Heppy boru Sitinjak**



Salah satu penerima bantuan PKH yang memiliki rumah sempit.

**Gambar 7**  
**Penerima bantuan PKH**  
**Ibu Senteria Haro**



**Gambar 8**  
**Penerima bantuan PKH**  
**Ibu Hotliboru Sinaga**



**Gambar 9**  
**Penerima bantuan PKH**  
**Ibu Delvi Modesta Situmorang**



**Gambar 10**  
**Penerima bantuan PKH Kristina Situmorang**



**Gambar 11**  
**Penerima bantuan PKH Ibu Romanti Nainggolan**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, (061) 8201994, Fax. (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

---

Nomor : 1090 / FIS.2/01.10/XII/2021  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan Data/Riset

14 Desember 2021

Yth,  
**Kepala Desa Parsaoran**  
**Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samsir Provinsi Sumatera Utara**

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Rotayu Sitinjak  
N P M : 188520063  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samsir Provinsi Sumatera Utara, dengan judul Skripsi **"Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-Tio Kabupaten Samsir Provinsi Sumatera Utara."**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dekan,  
**Dr. Effati Juliana Hasibuan, M.Si**



CC : File,-



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
KECAMATAN SITITIO  
DESA PARSAORAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

No: 03/07/SKTMP/I/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Parsaoran, Kecamatan Sititio, Kabupaten Samsir, menerangkan bahwa :

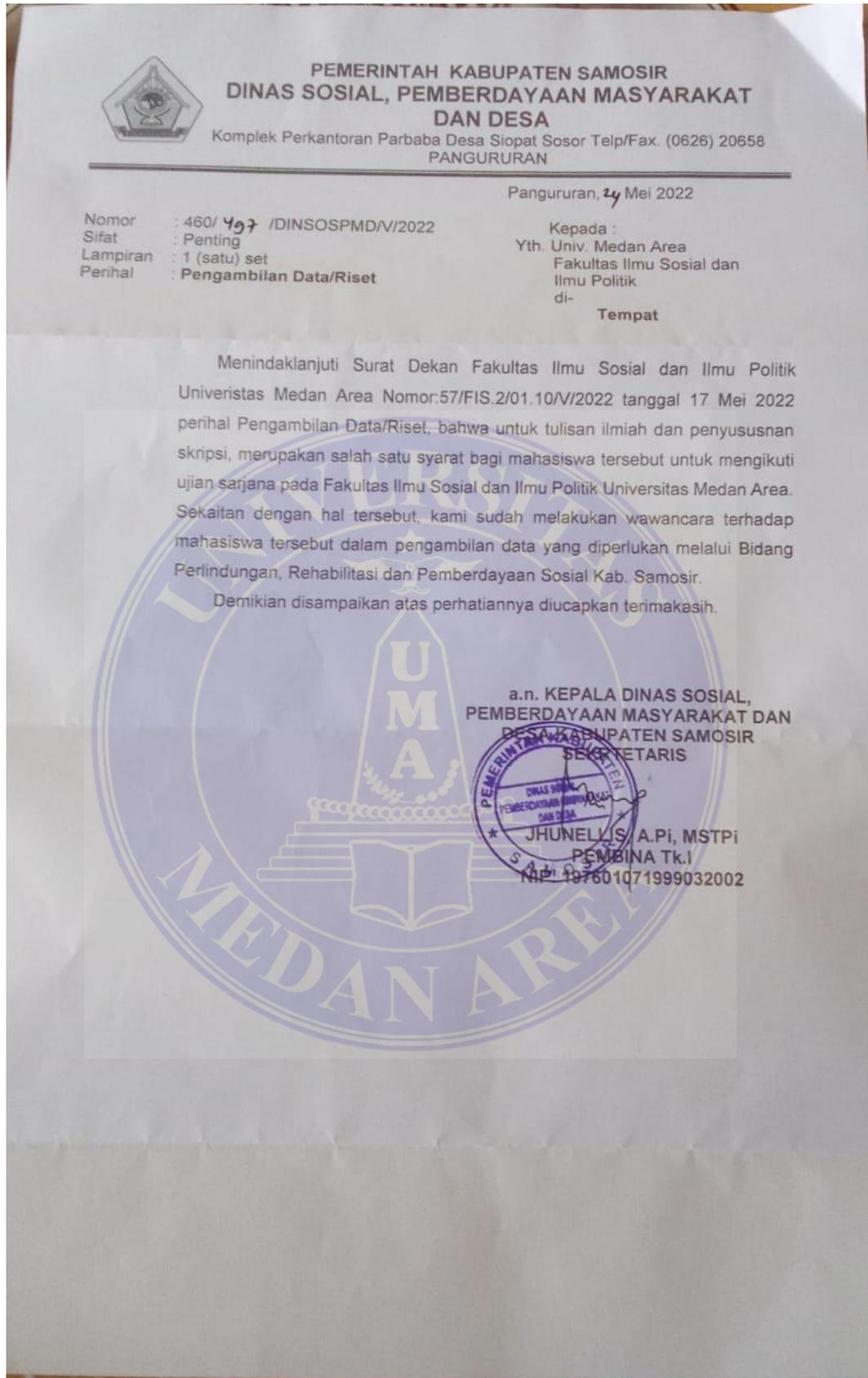
Nama : Rotayu Sitinjak  
Tmpt/Tgl lahir : Buntu Mauli, 21 Januari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Katholik  
Alamat : Silimapulu, Desa Parsaoran Kecamatan Sititio Kabupaten Samsir  
NPM : 188520063  
Program Studi : Administrasi Publik

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dari tanggal 05 Januari 2022 s/d 26 Januari 2022 di Desa Parsaoran, Kec.Sititio, Kab.Samsir. dengan Judul : **Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan dalam mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Parsaoran , Kec.Sititio, Kabupaten Samsir, Prov.Sumatera Utara.**

Demikian surat keterangan ini di keluarkan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Parsaoran, 26 Januari 2022





## DATA INFORMAN

### A. Informan kunci

Nama : James Nainggolan SPd  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 39 tahun  
Pekerjaan : Ahli Muda Penyuluh Sosial

Nama : Damenra Naibaho D3  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Usia : 40 tahun  
Pekerjaan : Koordinator PKH

Nama : Marisan Tamba  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Usia : 60 tahun  
Pekerjaan : Kepala Desa Parsaoran

Nama : Linduani Tamba S.E  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 31 tahun  
Pekerjaan : Petugas Pendamping PKH

### B. Informan utama

Nama : Romantika nainggolan  
Jenis kelamin : Perempuan  
Usia : 37 tahun  
Pekerjaan : Petani

Nama : Delvi Modesta Situmorang  
Jenis kelamin : Perempuan  
Usia : 37 tahun  
Pekerjaan : Petani

Nama : Hotlida Sinaga  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 56 tahun  
Pekerjaan : Petani

Nama : Heppy Sitinjak  
Jenis Kelamin : perempuan  
Usia : 43 tahun  
Pekerjaan : Petani

Nama : Kristina situmorang  
Jenis kelamin : perempuan  
Usia : 37 tahun  
Pekerjaan : Petani

Nama : Senteria Haro  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Usia : 56 tahun  
Pekerjaan : Petani

### **C. Informan Tambahan**

Nama : Lukman Tamba  
Jenis kelamin : laki-laki  
Usia : 58 Tahun  
Jabatan : BPD ( Badan Permusyawaratan Desa)